ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

PERSPEKTIF PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) KOTA MALANG

Yustinus Usfinit, Agung suprojo, Dody setyawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, universitas tribhuwana tunggadewi Email: yustinus218@gmail.com

Abstrak: Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua keinginan dan cita-cita bisa terakomodasi sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui partisipasi politik masyarakat pada Pilihan Kepala Daerah Kota Malang tahun 2013. (2) Mengetahui faktor yang menjadi motifasi partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Malang tahun 2013. (3) Mengetahui perspektif partisipasi politik masyarakat Kota Malang pada Pemilu Kada periode berikut. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan langkahlangkah pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat kota Malang terbagi atas pemberian suara, kampanye, mencari jabatan politik, dan partisipasi dalam pemungutan suara. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat adalah faktor lamanya tinggal, lingkungan, jumlah TPS, dan rasa ingi tahu. Sedangkan perspektif partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah periode berikut adalah penambahan jumlah TPS serta jaraknya, kepastian kartu pemilih yang dimiliki oleh seluruh PDT, dan kesadaran politik.

Kata Kunci: Partisipasi politik masyarakat, Pemilihan umum Kepala Daerah

Summary: A general elections as a means of democracy has been used most countries in the world including Indonesia. Through general elections allow all desires and aspirations can be accommodated so manifest a better life. This research aims to: (1) Determine the people political participation in the election of the Malang Regional Head in 2013. (2) Knowing the factors that motivate participation in the election in 2013. (3) Knowing the perspective of public political participation in the elections. This research used a qualitative research with the steps of collecting data through observation, documentation and interview. The results showed that the shape of the political participation of Malang society is divided into voting, campaigning, seek political office, and participation in the voting. Factors driving the political participation of society is a factor length of stay, the environment, the number of polling stations, and a sense of intending to know. While the perspective of people's participation in local elections following period is increasing the number of polling stations as well as the distance is, the certainty of voter cards owned by the whole PDT, and political awareness.

Keywords: Political participation of the community, the general election of regional heads

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terakomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2004 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman. Untuk bangsa yang baru lepas dari sistem otoriter, penyelenggaraan pemilihan umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legislatif dan pemulihan umum presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindak kekerasan merupakan prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

Dengan pemilihan umum tersebut rakyat Indonesia ingin turut secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan cirikas adanya modernisasi politik.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyaraka, sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat, karena pada saat pemilihan kepala daerah itulah rakyat menjadi pihak yang paling menentukan proses politik di wilayahnya dengan memberikan suara secara langsung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini berupaya mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perspektif partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang. Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (descriptive kualitative research).

Menurut (Sugiono,2009) metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.Sedangkan Metode deskriftif menurut (Nawawi,2007), dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan peneliti diambil dari informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang dan berdasarkan dokumen-dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut, dianalisis untuk kemudian disimpulkan berupa sebuah teori.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah KPU Kota Malang. Peneliti memilih KPU Kota Malang dikarenakan mampu memberikan data yang lengkap mulai dan proses hingga pertanggungjawaban terhadap subjek yang diteliti. Perlu untuk di ketahui untuk KPU Kota malang peneliti hanya mengumpulkan data sekunder sedangkan untuk data primer peneliti langsung terjun kemasyarakat.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud untuk mengungkapkan data yang dikumpulkan,diolah dan dianalisis dalam penelitian ini atau hal-hal yang dijadikan pusat perhatian dari penelitian ini. Adapun fokus dari penelitian yang berjudul : *Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Malang*, adalah :

- 1. Partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Malang.
- 2. Faktor pendorong partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Malang.
- 3. Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah Kota Malang periode berikut

Teknik Pengumpulan Data

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

Pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang di hasilkan di gunakan untuk menjawab memecahakan masalah yang ada. Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian antara laian:

1. *Interview* (wawancara)

(Budiono,2003) mengatakan meyode wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan antar peneliti (atau orang yang ditugasi), dengan subyek penelitian atau responden atau sumber data. Dalam hal ini pewawancara menggunakan percakapan sedemikian sehingga yang diwawancarai bersedia terbuka mengeluarkan pendapatnya.dalam penelitian ini orang yang diwawancarai adalah masyarakat Kota Malang yang mengikuti pemilihan kepala daerah(walikota).

2. Dukumentasi.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian (Moleong ,2006).

3. Observasi (pengamatan).

(Poerwandari,2007) observasi menjadi objek yng paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu. Observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian,apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menunjuk pada alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Interview Guide* (pedoman mancara)

Dalam melakukan melakukan wawancara, penelitiaan harus menggunakan pedoman wawancara itu sendiri merupakan serngkaian pokok-pokok pertanyaan yang hendak di ajukan kepada respon dalam penelitian.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar (Suharmini.1998). Observasi adalah cara mengamati tingkah laku obyek sedemikian rupa (Suharsimi,1989)

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan-catatn dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab. Begitu pula dengan Kota Malang, sebagai salah satu kota pendidikan dan destinasi wisata ini juga sibuk mempersiapkan hajatan demokrasi. Berdasarkan Keputusan KPU Kota Malang tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang 2013, bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Malang 2013 dimulai 24 Oktober 2012 sampai 23 Juli 2013.

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Malang resmi dilantik oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 Nopember 2012. Dengan semangat mengawal proses demokrasi dan wujud kecintaan kepada Kota Malang, 3 (tiga) orang Anggota komisioner (Ashari Husen, S.Sos., M.Si sebagai ketua, Fajar Santosa, SH dan Febry Chrisdanty, SH., M.Hum sebagai anggota) segera bergerak membentuk sekretariat dan Panwas Kecamatan demi membantu kelancaran kinerja Panwaslu Kota Malang.

Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013

Partisipasi politik seseorang dapat dilihat dengan jelas melalui aktivitas-aktivitas politiknya, begitu juga masyarakat Kota Malang dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan bersama oleh masyarakat di Kota Malang. Berdasarkan pendapat Mas'oed, (2001) Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013 partisipasi politik masyarakat mencakup partisipasi politik Konvensional hal ini terlihat dari hasil wawancara terkait kegiatan yang dilakukan masyarakat Kota Malang dan data statistik dari KPU Kota Malang berupa:

a. Pemberian suara

Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2013 di Kota Malang, masyarakat kota malang begitu antusias dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013. Hal ini dilihat dari berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara 612.565 pemili yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 399.648 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau sekitar 65% penduduk kota malang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah kota malang tahun 2013.

b. Menjadi panitia dalam pemilu

Keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pemilu tidak hanya terbatas pada pemberian suara tetapi keterlibatan dalam kepanitiaan juga merupakan partisipasi politik yang ditunjukan masyarakat kota malang Partisipasi masyarakat pada bagian ini Nampak pada keterlibatan masyarakat pada pemiliha kepala daerah keterlibatan masyarakat terbagi dalam beberapa bagian antara lain : menjadi paitia pemilu,dan menjadi saksi di TPS pada saat perhitungan suara. sedangkan menjadi saksi di TPS dari hasil yang dikeluarkan oleh KPU Kota Malang yakni 7200orang hal ini juga bagian dari pertisipasi politik masyarakat.

c. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilihan kepala daerah.

Dalam kegiatan kampanye masyarakat di Kota Malang sudah mengikuti kampanye sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya karena dalam kegiatan tersebut tidak hanya mencari hiburan saja namun untuk mendukung calon kepala daerah tertentu.kegiatan kampanye yang diikuti masyarakat Kota Malang pada umumnya dilakukan diluar ruangan seperti konvoi, atau di lapangan terbuka.

Faktor Yang Menjadi Pendorong Partisipasi Politik Masyarakat

Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarkat, artinya ,sebagai hal yang berhubungan dengan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Kota Malang pada pemilihan kepala daerah koa malang 2013, peneliti berusaha menggali informasi dari narasumber tentang faktor pendorong partisipasi politik masyarakat kota

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

malang pada Pemilihan kepala daerah kota malang 2013.

Berdasarkan hasil wawancara antar peneliti dan responden pada saat pengumpulan data peneliti menemukan beberapa factor yang menjadi pendorong partisipasi politik masyarakat kota malang pada saat pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013 yakni

1. Factor sosok calon

Pesta demokrasi langsung sudah diselenggarakan beberapa kali di indonesia terutama setelah masa orde baru yakni rakyat diberikan kebebasan penuh untuk memilih serta menentukan pemimpin tanpa intimidasi dari pihak manapun hal ini juga yang dirasakan oleh masyarakat Kota Malang. Pesta demokrasi yang seutuhnya diberikan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin seringkali disalah gunakan oleh pemimpin terpilih dengan cara mengabaikan kepentingan rakyat dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan untuk membangkitkan partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi diperlukan sosok yang mampu melihat serta mendengar kepentingan rakyat

2. Faktor visi dan misi

Masyarakat indonesia dalam tatanan pendidikan bisa dikatakan sudah mengalami peningkatan baik sehingga setiap perkembangan isu selalu diikuti dan dicermati seperti visi dan misi yang diusung oelh para calon juga tidak hanya sekedar didengar tetapi masyarakat mulai mengkaji realisasi dari visi misi para calon.

3. Faktor Lama Tinggal

Semakin lama seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut. Partisipasi masyarakat Kota Malang cukup besar pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 hal ini dikarenaka masyarakat kota malang mayoritas penduduk asli dan masyarakat pendatang yang sudah lama menetap dan menjadi masyarakat Kota Malang,sehingga rasa memiliki terhadap lingkngannya cukup kuat.faktor ini menjadi salah satu penyebab pendorong partisipasi masyarakat.

4. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali sistem politik dan menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik. Sosialisasi politik berperan mengembangkan serta memperkuat sikap politik di kalangan warga masyarakat yang sadar politik, yaitu sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Peranan tersebut melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga-lembaga tertentu yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pilkada sehingga sosialisasi politik perlu melibatkan semua unsur.

5. Kesadaran politik

Kesadaran yang dibentuk melalui pilkada menurut (Oktaviani 2011) sebagai salah satu pendukung partisipasi politik, selain daripada pendidikan politik. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Adanya kesadaran politik berarti adanya kesadaran masyarakat tentang bagaimana pengaturan urusan mereka; aturan seperti apa dan siapa yang akan menjalankan aturan tersebut.

6. Pendidikan politik

Pendidikan politk merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politk sehinga sangup bersikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkunganya. Pendidikan politk menjadi penting bagi masyarakat sebagai upaya penyampaian(penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukanya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimilki masyarakat guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakan keadilan dan demokrasi.

7. Jumlah TPS dan mudah dijangkau

Lokasi dan jumlah TPS menjadi factor pendorong partisipasi masyarakat Kota Malang pada pemilihan kepala daerah. Dari data yang diperoleh dari KPU Kota Malang jumlah TPS pada pemilihan kepala daerah Kota Malang berjumlah 1.200buah. Jika dibagi ke setiap kelurahan yang ada di Kota Malang maka rata-rata setiap kelurahan terdapat 21 TPS, serta lokasi TPS yang ditempatkan tidak jauh dari pemukiman warga.karena jarak Yang mudah ditempuh serta jumlah TPS yang memadai masyarakat antusias untuk berpartisipasi.

8. Rasa ingin tahu

Bagi masyarakat pemilih pemula kesempatan ini adalah pengalaman yang pertama dan mereka ingin tahu seperti apa ketika terlibat langsung dalam pemilihan. Hal ini juga menjadi factor pendorong partisipasi masyarakat. Rasa ingin tahu bukan saja dialami oleh pemilih pemula tetapi bagi masyarakat Kota Malang yang sudah beberapa kali ikut dalam pemilihan umum terutama pemilihan kepala daerah kususnya alasan yang mendasar adalah ingin mengetehui kinerja dari para calon kepalah daerah yang akan terpilih

Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang Yang Akan Datang

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik adalah bagian dari bentuk partisipasi. Keikutsertaan seseorang dalam kehidupan politik sering dipengaruhi oleh beberapa factor. Fakto yang menjadi pendorong timbul karna perspektif seseorang terhadap politik itu sendiri .

Masyarakat Kota Malang dalam hasil wawancara dengan peneliti menerangkan bahwa perspektif masyarakat terkait pemilihan kepala daerah yang akan datang, masyarakat akan terus berpartisipasi dengan memperhatikan beberapa factor yakni :

a. Kesadaran politik

Kesadaran akan partisipasi politik masyarakat apapun alasannya adalah merupakan suatu conditio sine qua non (prasarat utama) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Untuk itu pemerintah Kota Malang perlu meembangun kesadaran politik masyarakat sehingga masyarakat tetap berpartisipai pada pemilihan umum.

b. Lokasi TPS

Lokasi TPS menjadi alasan mendasar masyarakat terkait perspektif partisipai masyarakat pada pemililihan kepala daerah periode berikut. Lokasi TPS yang dekat dengan pemukiman mayarakat dapat memudahkan masyarakat dalam menjangkau TPS serta menghemat waktu untuk melakukan aktivitas yang lain

c. Kartu Pemilih

Kartu pemilih menjadi bukti bahwa seseorang telah cukup usia serta masuk dalam daftar pemilih pada pemilihan umum.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Kota Malang terlihat pada beberapa aktifitas pada saat pemilihan yakni

- Pemberian suara.Pemberian suara ini dilihat dari berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara 612.565 pemili yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 399.648 pemilih

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

diantaranya datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya atau sekitar 65% penduduk kota malang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan kepala daerah kota malang tahun 2013.

- Kampenye. Dalam kegiatan kampanye masyarakat di Kota Malang sudah mengikuti kampanye sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya karena dalam kegiatan tersebut tidak hanya mencari hiburan saja namun untuk mendukung calon kepala daerah tertentu serta mendengarkan visi dan misi dari para calon.
- Mencari jabatan politik. Pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013 diikuti oleh enam calon hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Kota Malang berpartisipasi aktif pada pesta demokrasi ini.partisipasi masyarakat Kota Malang bukan hanya sebagai pemilih tetapi aktif juga sebagai yang dipilih
- Partisipasi dalam pemungutan suara. Partisipasi masyarakat pada bagian ini Nampak pada keterlibatan masyaraka pada pada pemiliha kepala daerah keterlibatan masyarakat terbagi dalam beberapa bagian antara lain: ikut memberikan suara,menjadi saksi di TPS pada saat perhitungan suara,dan menjadi panitia pemantau pemilihan.

Factor yang menjadi pendorong partisipasi mayarakat Kota Malang pada pemilihan kepala daerah Kota Malang tahun 2013 yakni

- Factor lingkungan. Faktor lingkungan menjadi menjadi salah satu faktor pendorong partisipasi politik masyarakat, demikian halnya dengan partisipasi politik masyarakat kota malang.faktor lingkungan yang menjadi factor pendukung berupa lingkungan pendidikan.
- Factor lamanya tinggal. Partisipasi masyarakat Kota Malang cukup besar pada pemilihan kepala daerah tahun 2013 hal ini dikarenakan masyarakat kota malang mayoritas penduduk asli,sehingga rasa memiliki terhadap lingkngannya cukup kuat.
- Jumlah TPS. Dari data yang diperoleh dari KPU Kota Malang jumlah TPS pada pemilihan kepala daerah Kota Malang berjumlah 1.202 buah. Jika dibagi ke setiap kelurahan yang ada di Kota Malang maka rata-rata setiap kelurahan terdapat 21 TPS,serta lokasi TPS yang ditempatkan tidak jauh dari pemukiman warga.karena jarak Yang mudah ditempuh serta jumlah TPS yang memadai masyarakat antusias untuk berpartisipasi.
- Rasa ingin tahu. Bagi masyarakat pemilih pemula kesempatan ini adalah pengalaman yang pertama dan mereka ingin tahu seperti apa ketika terlibat langsung dalam pemilihan umum.
- Kesadaran politik. Masyarakat kota malang merasa sebuah kewajiban untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah kota malang. Kebajiban ini yang mendorong masyarakat untuk berpartsipasi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2013

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Rineka Cipta. Jakarta.

Bungin, B. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kartono, Kartini. 2006. Pemimpin dan Kepemimpinan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Margono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Mas'oed, Mohtar dan MacAndrews.2001. Perbandingan Sistem Politik. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Muluk, MR Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berfikir Sistem). Bayu Media Malang.

Moleong, Lexy J, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.

Raga Maran, Rafael.2001.pengantar sosiologi politik.Jakarta: Rineka Cipta.

Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

ISSN. 2442-6962 Vol. 3, No. 1 (2014)

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administratif. Alfabeta.Bandung.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar RepublikIndonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun2004, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.tentang pemilihan kepala daerah

SERTA UU RI No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.69 tahun 2009 tentang PedomanTeknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Karya tulis

Dowansiba Merkianus , 2010, Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Di Desa Kepuharjo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang''

Liberto Rango,2009. Peran Dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilu 20009 Di Kota Malang

Priyatmojo Heru ,2009.partisipasi politik masyarakat kota malang dalam pilkada 2008 http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat diunduh pada 07 mei 2013.

http://www.id,shvoong.com/law-and-politics/political-philosphy/2250830-bentuk-bentuk-partisipasi-politik/ diunduh pada 07 Mei 2013.

http://id.shvoong.com/law-and-politics/1853630-hak-kebebasan-berpendapat-bagi-setiap/ diakses 28 juli 2013.